

MODERNIZATION OF MADRASA POLICY IN EGYPT AND INDONESIA

Muhammad Fazlurrahman Hadi
University of Muhammadiyah Surabaya
safanahalfariziyah@gmail.com

Abstract: The Global competition has a long history that is marked by the enlightenment of the 18th century, especially Islamic education. There are currents called modernization of Islamic education, including Indonesia. However, it becomes important and interesting to study it not only from now on but how the modernization of Islamic education from its historical aspects. The existence of this research is expected to be able to describe the modernization of Islamic education in Indonesia and Egypt. This research was conducted using a literature research model (literature review), using a qualitative type. The discovery of figures who at that time were not well known, such as Rifa'ah al-Tahtawi, appeared to have not been much studied. The renewal of Islamic education in Indonesia that occurred at the beginning of the 20th century was also influenced by the thinking of figures in Egypt, such as the founder of the Adabiyah madrasa in Padang Panjang. The intermittent political upheaval in Egypt and Indonesia greatly influenced educational policies. The highest authority has not yet fully paid attention, although recently there have been some improvements made since Mubarak's leadership collapsed, not yet encouraging the advancement of educational institutions there. Almost the same thing also happened in Indonesia, since the reform era there have been many changes in the world of Islamic education, taking into account the salaries of civil servants and private teachers, but always leaving new problems or problems for education.

Keywords: Modernization, Policy, Madrasa, Indonesia and Egypt.

PENDAHULUAN

Senyampang dengan semakin derasnya persaingan global yang mempunyai sejarah panjang dengan ditandai era pencerahan pada abad ke-18, merupakan reaksi Eropa terhadap masa-masa kegelapan saat dikuasai oleh kepausan (*Babawiyah*). Serta simbol lain yang muncul ialah konsep filsafat pencerahan yang berusaha menyatukan antara rasionalisme juga empirisme dalam satu paradigma, kemudian dihadapkan pada kritik sosial yang mengevolusi kondisi sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.¹ Sedang di dunia pendidikan, terlebih pendidikan Islam. Terjadilah arus yang namanya modernisasi pendidikan Islam,² tak luput Indonesia termasuk di dalamnya. Akan tetapi menjadi

¹ Muhammad 'Imarah, *al-Islam Bayna al-Tanwir wa al-Tazwir*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2002), 11.

² Ide atau gagasan tentang modernisasi pendidikan Islam sejatinya mempunyai akar yang mengarah pada *modernisme* pemikiran dan institusi Islam secara koperhensif, artinya modernisme pendidikan Islam tak



penting dan menarik jika mengkajinya tak hanya dari masa sekarang saja, melainkan bagaimana pola modernisasi pendidikan Islam tersebut dari aspek historitasnya. Maka, membicarakan modernisasi pendidikan Islam di abad ke-19 dan 20 atau pra-kemerdekaan di Indonesia tentu tak bisa dilepaskan dari pengaruh lokasi kemunculan Islam itu sendiri. Pada konteks ini, ialah Arab tempat dilahirkannya Islam, tentu lengkap beserta upaya-upaya pendidikannya.³

Arab dalam hal ini kemudian yang dimaksudkan adalah negara-negara Timur-Tengah, sebab peradaban Islam lahir tak hanya dari Saudi Arabia semata. Melainkan, dari beberapa negara yang ada di kawasan Timur-Tengah, seperti Suria, Mesir, Iraq, Libya, Maroko, dan lain sebagainya.⁴ Oleh karena itu, dalam kajian kali ini, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia dan Timur Tengah. Akan tetapi, karena terbatasnya ruang pada tulisan ini untuk mengkaji satu-persatu kawasan Timur-Tengah, maka penulis membatasi wilayah diskursus, yaitu pada Mesir. Karena, Mesir dirasa mempunyai tujuan dan struktur pendidikan, pula problematika yang serupa dengan yang dimiliki Indonesia.

Selain dipandang perlu untuk membatasi ranah diskursus yang akan dikaji, penting juga menentukan kurun waktu yang dibahas, adalah pada abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20. Sebab, pada masa-masa ini gagasan pembaharuan Islam merupakan embrio dari modernisasi⁵ di bidang pendidikan Islam. Jika ditilik dari

bisa dilepaskan dari kebangkitan ide modernisasi Islam itu sendiri. Ternyata, rancangan-rancangan yang berada di balik *modernisme* pemikiran dan kelembagaan Islam adalah prasyarat bagi kebangkitan kembali umat Islam di zaman modern. Masih menurut Azra, pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini ialah pendidikan Islam sebagaimana yang didefinisikannya, yakni suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad melalui proses tersebut personal dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah fi al-ard*. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2014), 6:30.

³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, v.

⁴ Menurut George Lenczowski, Timur Tengah memiliki posisi geografis yang unik yaitu pada pertemuan Eropa, Asia dan Afrika. Pada mulanya tak ada kesepakatan untuk kemudian menyebut wilayah-wilayah tersebut menjadi istilah Timur Tengah (*middle east*), bahkan sebelumnya dikenal dengan terma Timur Jauh (*near east*). Sehingga Timur-Tengah merupakan sebutan dari orang-orang Eropa, terutama Inggris dalam melihat posisi wilayah jajahan di masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yaitu Timur Dekat, Timur Tengah, dan Timur Jauh. Masih menurut Lenczowski secara politis dan kultural, Timur Tengah bisa dibagi ke dalam dua wilayah utama, yaitu Sabuk Utara dan Inti Arab. Sabuk Utara diisi oleh etnis non-Arab dan berbatasan langsung dengan Rusia, seperti Turki dan Iran. Sedangkan Inti Arab merupakan wilayah yang mayoritas diisi oleh etnis Arab seperti Arab Saudi, Irak, Yaman, Kuwait, Oman, Mesir, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1980), 21. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pada tahun 610-661 suku-suku di Timur-Tengah pernah terintegrasi di bawah payung Pemerintahan Islam.

⁵ Modern dalam bahasan ini ialah upaya untuk mentransformasi sesuatu yang status quo menuju fase yang lebih statis, dinamis, dan elastis sesuai dengan gerak zaman. Hal yang senada juga disampaikan oleh Harun Nasution, kata *modern*, *modernisme* dan *modernisasi* mengandung makna pikiran, aliran gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya agar menjadi sesuai pendapat-pendapat serta keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh



fenomena yang berkembang, Buchori mencoba untuk memetakan struktur internal pendidikan Islam di Nusantara yang kemudian oleh Muhaimin disempurnakan paling tidak ada lima jenis praktik pendidikan Islam, yaitu: *pertama*, pendidikan pondok pesantren. *Kedua*, pendidikan madrasah. *Ketiga*, pendidikan umum yang bernafaskan Islam. *Keempat*, pelajaran agama yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran saja. *Kelima*, pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah (pendidikan Islam non formal).⁶

Dan pada dua negara Indonesia-Mesir, penulis melakukan pembacaan kritis dengan membandingkan seperti apa struktur pendidikan Islam dan khususnya perkembangan apa dalam mengelola lembaga pendidikan Islam -adalah jenis kedua yaitu pendidikan madrasah- yang dihasilkan dengan ragam sosial-budaya yang berbeda antar kedua negara ini. Hal-hal itulah yang menjadi substansi kajian pada makalah ini, akan tetapi juga tak menutup kemungkinan adanya pemaparan terhadap fenomena serta problematikan pendidikan Islam yang lainnya.

MELACAK AKAR MODERNISASI MADRASAH: MESIR DAN INDONESIA

Sejarah telah mencatat bahwa modernisasi pendidikan Islam menjelang pertengahan abad ke-19 M. Dimulai pertama kali oleh Turki, pada waktu itu masih bernama Turki Uthmani. Selanjutnya, modernisasi pendidikan juga terjadi di Mesir - ketika itu berada di bawah kekuasaan Turki- yang lebih pada aspek modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam, serta pemimpin Mesir kala itu ialah Muhammad Ali Pasha. Pengalaman Turki dan Mesir dalam melakukan modernisasi tersebut, agaknya cukup untuk mendeskripsikan proses-proses merosotnya sistem pendidikan tradisional dalam arus yang masif. Namun, terlepas dari kemerosotan sistem pendidikan tersebut, pendidikan Islam secara riil menghadapi tantangan baru, yakni sistem peradaban manusia yang lebih kompleks.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa kajian ini mencoba melakukan pembacaan pada madrasah sebagai salah satu model pendidikan Islam. Dan meskipun terdapat kontroversi tentang madrasah mana yang lebih awal kemunculannya dalam sejarah umat Islam, seperti yang direspon oleh Ira M. Lapidus.⁷ Pada karya ini

ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 11.

⁶ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum, hingga Redefinisi Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: PT. Nuansa, 2010), 13.

⁷ Lapidus memberikan predikat pada madrasah sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam Islam yang berkembang di bawah patronase penguasa dan mengambil masjid sebagai modelnya. Madrasah mempunyai perpustakaan yang tergabung dalam bangunan yang sama dengan induknya. Untuk penyediaan literatur bagi peserta didiknya, madrasah melakukannya dengan mencontoh *halaqah-halaqah* gerakan rasional yang telah terpengaruhi budaya Hellenistik dan berkembang pesat pada masa Dinasti Abbasiyah. Dalam materi kajian, madrasah menonjolkan pendidikan hukum sebagai kajian utamanya dengan metode pengajaran dan menawarkan bidang studi yang telah berkembang di masjid-masjid. Dimana metode ini melibatkan penyalinan manuskrip, menghafal dan keterlibatan dalam diskusi. Masih menurut Ira M. Lapidus, ia menyatakan bahwa madrasah atau perguruan ini dibentuk sebagai pusat pendidikan hukum. Sebuah madrasah adalah bangunan yang digunakan untuk belajar serta sebagai



signifikannya bukan tentang diskursus di atas, melainkan pada kurikulum pendidikan yang diberlakukannya.

Secara teknis, proses belajar-mengajar di madrasah formalnya tidak berbeda jauh dengan sekolah. Akan tetapi di Indonesia, madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah. Namun diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yaitu sekolah agama. Tempat di mana para peserta didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan Islam.⁸ Terlepas dari hal tersebut, bila dibandingkan dengan pelabelan pendidikan di Indonesia dewasa ini pada umumnya merupakan pinjaman dari bahasa Barat, seperti universitas (*university*), sekolah (*school*), akademi (*academy*), dan lain sebagainya. Pengertian madrasah dalam konteks Indonesia memang berbeda, lalu penerjemahan kata *madrasah* ke dalam bahasa Indonesia dengan mengaitkan pada bahasa Barat dianggap tidak relevan. Di Indonesia, madrasah tetap dipakai dengan kata aslinya, kendati pengertiannya tidak lagi persis dengan apa yang dipahami pada masa klasik. Karena, pergeseran makna dari lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah tersebut tak hanya terjadi di Indonesia semata, melainkan di Timur-Tengah pun juga demikian.⁹

Sejauh ini, tampaknya belum ada data yang pasti kapan istilah *madrasah* sebagai lembaga pendidikan mulai digunakan di Indonesia. Para peneliti sejarah Islam pun, pada umumnya lebih tertarik membicarakan sistem pendidikan atau pengajaran tradisional Islam yang digunakan baik di masjid, surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), dan lain sebagainya, dibandingkan membicarakan madrasah. Dalam beberapa hal, penyebutan istilah *madrasah* di Indonesia juga sering menimbulkan konotasi ketidak aslian, tak cukup sampai di sana bahkan *madrasah* kemudian menjadi sorotan dunia Internasional tatkala munculnya Taliban di Afghanistan pada tahun 1996, serta semakin meroket pada pasca peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat.¹⁰ Bergeser ke Mesir, pada masa

residen (tempat tinggal) bagi guru dan murid, umumnya dilengkapi dengan sebuah perpustakaan. Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 134-137.

⁸ Pada awal perkembangan, gagasan modernisme pendidikan Islam terdapat dua kecenderungan pokok yang mendasari upaya ke arah modernisme organisasi-organisasi Islam tersebut. Di satu pihak, adopsi terhadap sistem dan lembaga pendidikan modern hampir menyeluruh dalam anatomi pendidikan Islam. Titik tolak modernisasi pendidikan Islam di sini adalah sistem kelembagaan pendidikan modern (Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional, seperti sekolah Adabiyah (1915) dan sekolah Muhammadiyah. Sedangkan sisi lainnya, ialah berangkat dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri, misalkan madrasah, surau, Ponpes. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III...*, 36. Maka, diferensiasi antara kedua model lembaga pendidikan Islam tersebut merupakan pemilahan dalam upaya modernisasi pendidikan Islam itu sendiri. Lihat juga: Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum, hingga Redefinisi Islamisasi Ilmu Pengetahuan ...*, 15.

⁹ Lihat misalnya; Stanford J. Shaw, *History of The Ottoman Empire and Modern Turkey*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976); Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

¹⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III...*, 94.



Rifa'ah al-Thahtawi¹¹ dipercaya oleh Muhammad Ali Pasha untuk memperbaharui pendidikan Islam, ia mengajukan jenjang pendidikan Islam dalam hal ini adalah madrasah. Di antaranya, *al-Ibtidaiyah*, *al-Thana'iyah*, dan *al-'Aliyah*.¹²

Tak hanya sampai di situ, al-Thahtawi mempertegas kurikulum dari setiap jenjang tersebut. Pada tingkat *al-Ibtidaiyah* semua lapisan masyarakat memiliki hak dan pelayanan yang sama, baik anak pejabat, kaya, dan miskin. Di mana diajarkan pada jenjang ini baca-tulis yang bersumber dari al-Qur'an, dasar-dasar ilmu hitung dan tehnik, fikih, serta ilmu Nahwu. Sementara untuk tingkatan *al-Thana'iyah*, jenjangnya yang lebih tinggi dari pada tingkat sebelumnya, pada umum -*ghalib*-nya tak menarik minat atau atensi dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dengan pertimbangan dari segi perekonomian, maka sangat wajar jika siswa yang banyak menuntut ilmu pada tingkat ini adalah dari kalangan menengah dan berada saja. Menurut al-Thahtawi, sudah semestinya dari pihak pemerintah -saat itu- agar memberi motivasi atau penyuluhan kepada para wali murid mengenai pentingnya mencerdaskan anak-anak bangsa demi sebuah urbanisasi yang ingin dicapai. Pada tingkat ini diajarkan berbagai bidang ilmu, seperti: ilmu matematika bersama cabangnya, ilmu geografi, sejarah, biologi, fisika, mantiq, kimia, tata negara, ilmu pertanian, peradaban, dan bahasa asing.¹³

Adapun pada strata *al-'Aliyah* diajarkan kepada para peserta didiknya ilmu-ilmu khusus yang mereka kuasai, tetapi hal ini akan dilakukan setelah menguasai ilmu-ilmu dasar. Diantaranya adalah ilmu fikih, kedokteran, astronomi (*falaky*), geografi, dan sejarah. Lebih tepatnya bisa dikatakan sekolah pada strata yang lebih tinggi ini, sebagai

¹¹ Rifa'ah al-Thahtawi dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Thahtha pada tahun 1216 H / 1801 M. Ayahnya bernama Rafi' ibn Badawi ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Rafi' ibn Hariz ibn Muhammad Shams al-Din ibn Abd al-Rahman ibn Abi al-Qasim al-Shaghbir ibn Shihab al-Din Ahmad ibn Abi Abdillah Muhammad ibn Yahya ibn Abi Bakr ibn Yahya ibn Abi al-Qasim al-Tahta'i ibn Abd al-Aziz ibn Yusuf ibn Rafi' ibn Jundab ibn Muhammad ibn Sultan ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajun ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Isma'il ibn Ja'far al-Zaky ibn Muhammad al-Ma'mun ibn 'Ali al-Haridl ibn Husein Jaud (dijuluki al-Faridl) ibn Muhammad al-Dibaj ibn Ja'far al-Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn 'Ali Zain al-'Abidin ibn Ali ibn Abi Thalib. Lihat: Rifa'ah al-Thahtawi, *Manahij al-Albab al-Misriyah fi Mabahij al-Adab al-Ashriyah*, diteliti oleh: *Musthafa Labib Abd al-Ghani*, (Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitab, 2010), 3. Sejatinya, jika membicarakan modernisasi pendidikan Islam di Mesir pertama kali bukanlah dilakukan oleh Muhammad Abduh, Jamal al-Din al-Afghani, melainkan Rifa'ah al-Thahtawi inilah yang banyak melakukan perubahan nyata pada dunia pendidikan Islam pada permulaannya.

¹² Kemudian tiga jenjang pendidikan tersebut saat ini sudah disederhanakan menjadi: Sekolah Dasar (*Ibtida'i*), Sekolah Menengah Pertama (*I'dadi*), dan Sekolah Menengah Atas (*Thanawiyah 'Ammah*). Sehingga ada estimasi dari penulis, bahwa jenjang pendidikan yang ada di tanah air mengadopsi dari sistem pendidikan yang diterapkan Mesir berdasarkan gagasan Rifa'ah al-Thahtawi. Namun, jika di Indonesia sudah mengalami modifikasi, terutama pada sejumlah mata pelajaran pada setiap jenjang, mulai dari "Madrasah Ibtidaiyah", "Madrasah Thanawiyah", dan "Madrasah 'Aliyah". Muhammad Fazlurrahman Hadi, Rifa'ah Al Thahthawi: Sang Pembaharu Pendidikan Islam, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2019), 57.

¹³ Al-Thahtawi, *al-Murshid al-Amin li al-Banat wa al-Banin*, (Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2010), 63.



sekolah kejuruan. Dengan harapan para siswa alumnusnya mampu menjadi seorang *mujtahid*, yang dapat berkonversi, sehingga akhirnya menjadi para *mujtahid* sekaligus *mujaddid* (pembaharu).¹⁴

Akan tetapi, hal ini tidak serta merta menafikan perhatian “pakar pendidikan Islam” terhadap ilmu-ilmu agama. Al-Thahtawi misalkan, justru menempatkan ilmu agama di tingkatan pertama atas seluruh ilmu pengetahuan yang ada, pasalnya, agama adalah penjaga umat dari ketergelinciran ke jurang kesesatan. Al-Thahtawi menjelaskan,

“Tidak mungkin akan diketemukan perkara shar’i kecuali dengan ilmu yang datang dengannya (al-Qur’an), dan tidak akan diperoleh sebuah ilmu melainkan dengan mengamalkannya (al-Qur’an), serta bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Mencakup *-ushul, furu’-nya*, barang siapa yang mengaplikasikannya, maka dia telah meng-infaqkan seluruh jiwa dan waktunya untuk agama. Lalu dia akan mendapatkan dua kebaikan dunia dan akhirat yang diibaratkan dengan ilmu penghidupan serta ilmu untuk menuju surga”.¹⁵

Dari kurikulum pendidikan Islam di Mesir di atas, secara tersirat bahwa Mesir sudah memikirkan tentang arti pentingnya kapabilitas untuk peserta didik, sehingga ia memuat materi-materi pelajaran kejuruan. Di sisi lain, terlihat jelas Mesir -terutama al-Thahtawi- sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat pada saat itu, “perkembangan kebudayaan bangsa Mesir yang masih jauh tertinggal dari negara lain”. Sehingga perlu di kala itu untuk membuat kurikulum pendidikan yang menghasilkan anak didik yang dapat bermanfaat bagi publik pada waktu itu. Dalam hal ini, dapat di terka sebenarnya al-Thahtawi telah menguasai ilmu pengembangan kurikulum, diantaranya contoh dalam mengembangkan kurikulum yang dilakukan adalah memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar tempat institusi pendidikan tersebut berada, dengan memberikan materi yang senada, misalkan ilmu pertanian, dan lain sebagainya.

TRANSFORMASI MADRASAH: SEBUAH UPAYA MENATA MASA DEPAN

Saat ini eksistensi madrasah sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia telah sejajar dengan sekolah umum. Hal ini ditengarai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah telah menempatkan madrasah pada posisi yang sederajat, baik negeri maupun swasta. Kedudukan yang bersifat legal-formal bagi madrasah ini, merupakan wujud kebijakan pemerintah yang disatu sisi dapat mendongkrak status madrasah di masyarakat, pada mulanya sebagai lembaga pendidikan kelas dua (*second class*), meningkat dan berdiri

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Al-Thahtawi, *al-Murshid al-Amin li al-Banat wa al-Banin...*, 71.



sejajar dengan pendidikan umum. Namun, madrasah masih dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk menentukan masa depannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Lalah, apakah madrasah bertahan dalam pola lama sebagai lembaga pendidikan yang lebih memprioritaskan pendidikan agama Islam atau mengubah dirinya menjadi sekolah umum dengan mengosentrasikan pendidikannya pada pengetahuan umum (70%) dan sedikit pengetahuan agama (30%).¹⁶

Penulusuran napak tilas madrasah dapat dimulai dari usaha-usaha memperbaiki dan memodernisasi sistem pendidikan Islam, baik yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin-pemimpin Islam maupun yang dilakukan secara institusional lewat organisasi keagamaan. Modernisasi pendidikan Islam model madrasah yang dilakukan secara personal, seperti yang dilakukan Abdullah Ahmad di Padang Panjang pada tahun 1907 dengan mendirikan sekolah Adabiyah. Sistem yang dipakai, diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen di sekolah tersebut adalah sistem klasikal. Selain itu, pelajaran agama, pelajaran membaca dan menulis huruf latin serta ilmu berhitung juga diberikan.¹⁷ Dengan demikian, madrasah seperti yang disebutkan di atas sangat berbeda pengertiannya antara masa klasik Islam dengan masa ketika lembaga pendidikan tersebut masuk ke Indonesia pada abad ke-20 M, madrasah di Indonesia merujuk pada pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan pada masa klasik madrasah merujuk kepada lembaga pendidikan tinggi (*the institution higher learning*).¹⁸

Kurikulum madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya mempunyai dua komponen pokok, di antaranya adalah pendidikan umum dan pendidikan Islam. Oleh karena status madrasah pada semua jenjang telah disamakan dengan sekolah umum, kurikulum komponen pendidikan umum pada madrasah mengikuti kurikulum yang diterapkan Depdiknas. Pada hal ini, madrasah menanggung beban yang sangat berat, sebab madrasah di satu sisi harus mengonstruks “ulama” sebagai fungsi utamanya dan di sisi lainnya madrasah harus menanamkan pendidikan umum untuk mengikuti alur kurikulum nasional.

Bahkan, yang mengerikan adalah apa yang disinyalir oleh Masdar Hilmy bahwa berbagai persoalan yang dihadapi pendidikan Islam umumnya ialah akibat ketidakjelasan

¹⁶ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ...*, 179-181.

¹⁷ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum, hingga Redefinisi Islamisasi Ilmu Pengetahuan ...*, 18. Lihat juga: Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ...*, 168-169.

¹⁸ Menurut Azra, madrasah sebagai lembaga pendidikan tinggi ini tidak bisa disamakan artinya dengan universitas. Dalam pengertian, lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan penyelidikan bebas berdasarkan nalar. Dalam tradisi pendidikan Islam, pendidikan tinggi lebih dikenal dengan nama *al-Jami'ah*, yang secara historis kelembagaan tersebut berkaitan dengan masjid Agung (masjid besar tempat berkumpulnya jamaah dalam menunaikan s}alat Jum'at). Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III...*, vi.



sikap serta kerangka keilmuan pada praktisi pendidikan tersebut. Pada satu sisi, praktisi pendidikan Islam dengan lantang menuduh ilmu-ilmu yang disebut umum itu (termasuk ilmu dan teori tentang pendidikan serta pembelajaran) sebagai ilmu yang sekuler. Akan tetapi, ilmu atau teori tersebut tidak mungkin ditolak untuk diadopsi bagi kepentingan pembelajara pula bagi penyiapan lulusan (*learning outcome*) yang siap kerja. Sementara itu, pendidikan Islam belum berhasil membangun ilmu dan teori sendiri yang bersumber dari pengalaman empirik serta sumber ajaran yang cukup layak didengar dunia ilmiah. Sekedar mencoba membangun ilmu dan teori pendidikan Islam yang mandiri dari lembaga-lembaga perguruan tinggi Islam negeri atau swasta pun tampaknya juga belum dilakukan. Boleh jadi, lembaga pendidikan tinggi Islam itu cukup puas dengan menikmati ilmu serta teori yang dicap sekuler tersebut dari pada susah-susah membangun ilmu atau teori sendiri.¹⁹

Meminjam istilah Arkoun, bahwa “relasi-kuasa” biasanya akan ditopang oleh tiga jenis pilar hegemoni. Yaitu salah satunya hegemoni budaya (*shulthah thaqafiyah*) yang ada pada para agamawan-intelektual (*rijal al-Din al-Fuqaha*).²⁰ Begitu pula yang terjadi pada dunia pendidikan Islam Mesir, dan penulis membaginya menjadi tiga gelombang perubahan. Di antaranya pada rejim Muhammad Ali Pasha, berikutnya Gamal Abdul Nasr, serta tumbangnya orde Muhammad Husni Mubarak. Ketika masa Muhammad Ali Pasha sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia berusaha melakukan manuver-manuver politik, termasuk di dalamnya pada para cendekiawan atau ranah pendidikan, salah satunya dengan mempercayakan pembaharuan pendidikan Islam pada Rifa’ah al-Thahthawi .

Tak luput pula di era revolusi Mesir tahun 1952, dimana kala itu yang berkuasa adalah Gamal Abdul Nasr. Ia melakukan beberapa langkah untuk mendukung tujuan modernisasinya, kemudian Nasr membaginya menjadi tiga tahapan. *Pertama*, mengadakan konsolidasi kekuatan secara revolusioner, membentuk partai liberal agar mendukungnya, serta memanfaatkan kaum agamawan demi legitimasi kelanggangan jabatannya. *Kedua*, pembangunan yang ditekankan pada aspek ekonomi dan sosial, bersamaan dengan munculnya krisis Suez tahun 1956, sehingga ia ikut menjadi aktor pemimpin Nasionalis Arab. *Ketiga*, transformasi sosial yang ditekankan pada bidang ekonomi dan industrialisasi.²¹ Kebijakan yang dikeluarkan Nasr tersebut, bukan tak membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam.

¹⁹ Masdar Hilmy, Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah, (Malang: Madani, 2016), 128.

²⁰ Lebih lengkapnya adalah *pertama*, hegemoni politik yang ada pada para penguasa (*shulthah siyasiyah*). *Kedua*, hegemoni legeslasi normatif (*shulthah tashri'iyah*) yang ada pada para hakim. *Ketiga*, hegemoni budaya (*shulthah thaqafiyah*) yang ada pada para agamawan-intelektual (*rijal al-Din al-Fuqaha*) Muhammad Arkoun, *Tarikhayah al-Fikr al-Arabi al-Islami*, (Beirut: Markaz al-Inma' al-Qaumi, 1996), 166.

²¹ George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs ...*, 544-554.



Maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 210 tahun 1953 yang bertujuan menasionalisasikan semua pendidikan persiapan (*preparatory education*), yakni mengatur jenjang sekolah pada tingkat dasar dengan usia 6 tahun sampai 12 tahun. Lulusan ini dapat melanjutkannya ke jenjang berikutnya selamat 3 tahun. Tak puas dengan UU di atas, keluarlah UU No. 213 tahun 1956, ialah penghapusan biaya pada sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya muncul UU No. 160 tahun yang melarang sekolah-sekolah asing dan menyerahkannya pada pihak swasta dalam negeri, pula kurikulum pada waktu itu berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan.²²

Pada masa Gamal Abdul Nasr ini pula, dilanjutkan modernisasi pendidikan di universitas al-Azhar, bertepatan pada 18 Juli 1961. Ia menetapkan bahwa seluruh administrasi universitas al-Azhar berada di bawah kendalinya. Sehingga, berdampak pada perubahan sistem, perencanaan serta program-program studi di al-Azhar. Dalam hal ini, Nasr mempercayakan pengembangan pendidikan pada Taha Husein. Gagasan yang dia lakukan ialah:²³ *pertama*, menambah jurusan-jurusan umum, seperti pendidikan; kedokteran; farmasi dan lain-lainnya. *Kedua*, menambah muatan kurikulum, yakni dengan membuka sekolah-sekolah modern yang diajarkan di dalamnya ilmu-ilmu modern pula, selain ilmu agama. Demikian pula pada al-Azhar, muatan kurikulumnya dikembangkan dengan menambah mata kuliah yang mengajarkan bahasa-bahasa asing, misalkan Inggris, Perancis dan Italia. Hal ini didasarkan, bahwa untuk menguasai IPTEK dan perkembangannya, maka dituntut untuk menguasai beberapa bahasa asing yang menunjangnya. Selain itu, IPTEKS tak selayaknya dimiliki oleh satu bangsa saja, akan tetapi harus dimiliki semua bangsa. *Ketiga*, mengutus duta-duta ilmu pengetahuan ke negara-negara Barat. Hal yang absah saja, sebab dahulu orang-orang Barat banyak belajar ke Timur-Tengah, tatkala kaum muslimin mempunyai keilmuan yang kosmopolit. Semuanya telah berubah, di saat orang-orang Barat menuju tatanan yang modern, umat Islam malah mengalami stagnasi pemikiran, dan mereka mengalami kemajuan di segala bidang. Sehingga tak menjadi masalah bila orang-orang muslim belajar dari kemajuan yang telah diperoleh mereka. *Keempat*, memperbanyak secara kuantitas fasilitas pendidikan, yaitu fasilitas yang terkait dengan kegiatan belajar-mengajar, seperti ruang belajar.

Selain itu, mereka juga mendirikan akademi bagi kaum wanita di dalam kompleks al-Azhar, yang kemudian hari berkembang menjadi universitas khusus bagi kaum perempuan. Sejatinya, dalam memperjuangkan dan menggaungkan pendidikan bagi kaum wanita pada masa Islam modern di Mesir adalah Rifa'ah al-Thahthawi (1801-

²² Bayard Dodge, *al-Azhar, a Millenium of Muslim Learning*, (Washington DC.: The Middle East Institute, 1961), 157.

²³ Taha Husein, *Mustaqbal al-Thaqafah fi Mishr*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), 211-216.



1873). Agar wanita Mesir mendapatkan pendidikan yang sama.²⁴ Pemikiran tersebut kemudian lebih ditegaskan oleh penerusnya Muhammad Abduh (1849-1905). Menurutnya, wanita sesungguhnya dalam Islam mempunyai kedudukan yang tinggi, namun adat istiadat dari luar Islam yang mengubah hal tersebut, sehingga akhirnya wanita Islam nampaknya berada pada kedudukan yang rendah dalam masyarakat.²⁵ Gagasan ini kemudian dikupas lebih detil lagi, seperti Qosim Amin (1865-1908) dalam karyanya *Tahrir al-Mar'ah* (kebebasan wanita) juga *al-Mar'ah al-Jadidah* (wanita modern). Menurutnya, umat Islam Mesir mundur dikarenakan kaum wanita -setengah dari jumlah penduduk Mesir- tidak pernah memperoleh pendidikan sekolah.²⁶ Ide ini lantas dilanjutkan oleh Thaha Husein (1899-1973), dan pada masanya kaum wanita diberikan izin untuk berkuliah di al-Azhar.²⁷

Lain halnya dengan di masa Husni Mubarak terguling dari kekuasaannya, dengan begitu cepat universitas baru telah dibuka, sebelumnya hanyalah sebagai kampus cabang dari universitas-universitas yang ada di pusa-pusat perkotaan. Perguruan tinggi baru tersebut terletak di wilayah-wilayah terluar Mesir, tujuan didirikannya ialah untuk memudahkan mahasiswa di daerah mendapatkan perguruan tinggi, tanpa harus ke perkotaan. Langkah pemerintah ini sebagai bagian untuk terus mendorong siswa lulusan dari sekolah menengah atas agar melanjutkan ke perguruan tinggi, karena tingkat partisipasi mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat minim, yakni hanya 25-28% dari seluruh lulusan sekolah menengah atas. Tujuan lainnya, agar dapat mengurangi membludaknya dan terfokusnya mahasiswa hanya pada universitas-universitas besar di perkotaan. Di tahun 2010, total siswa yang terdaftar di semua jenjang pendidikan adalah 2. 646.000 siswa. Di antara mereka, satu persatu memasuki salah satu dari 23 universitas negeri, termasuk universitas al-Azhar. Selain masuk di PTN, mereka juga masuk di 19 universitas swasta, 18 lembaga pendidikan tinggi umum, dan 81 lembaga tinggi swasta. Pemerintah Mesir berkomitmen untuk meningkatkan jumlah siswa yang akan mendaftar di perguruan tinggi dari 2,5 juta menjadi 2,8 juta pada tahun berikutnya. Akan tetapi keadaan pemerintahan yang kurang baik, berdampak pada perubahan yang sangat berarti serta reformasi sulit untuk diraih. Antara Maret 2011 dan Juni 2013, perombakan kabinet mengakibatkan pengangkatan dan pemberhentian dari tujuh menteri pendidikan yang berbeda. Menteri Mahmoud Abo El-Nasr, diangkat sebagai bagian dari kabinet Perdana Menteri Hazem El-Beblawi setelah penggulingan

²⁴ Tujuan adanya pendidikan untuk kaum wanita, agar dapat menjadi Istri yang baik serta bisa menjadi teman suami dalam kehidupan intelek dan sosial. Lebih dari pada itu, pendidikan untuk wanita juga dalam rangka membentuk kepribadian pula menanamkan rasa patriotisme atau *Hub al-Watjan*. Al-Thahthawi, *al-Murshid al-Amin li al-Banat wa al-Banin...*, 66;90.

²⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan ...*, 79.

²⁶ Ibid., 79-80.

²⁷ Ibid., 86-87.



militer terhadap Mohamed Morsi, presiden pertama negara itu yang dipilih secara demokratis.²⁸

Program pendidikan wajib belajar di Mesir adalah dari kelas I sampai kelas 9. Sistemnya mengikuti pola 6 + 3 + 3, dengan enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah dan tiga tahun sekolah menengah atas. Rasio partisipasi kasar semua siswa yang terdaftar pada sekolah menengah, tanpa memandang usia, pada tingkat menengah adalah 72 %, sedangkan rasio partisipasi murni pada siswa usia sekolah menengah adalah 70 %. Tanggung jawab umum untuk pendidikan di Mesir dibagi antara Departemen Pendidikan dan Departemen Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan mengawasi pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan persiapan dan menengah, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi mengawasi pendidikan tinggi. Sedangkan Dewan Tertinggi Universitas bertugas menetapkan kebijakan secara keseluruhan dan mengawasi pembentukan lembaga baru. Pendidikan al-Azhar berada di bawah kewenangan Kementerian Kebijakan al-Azhar. Di Mesir, Sekolah Dasar berlangsung enam tahun untuk siswa berusia enam tahun sampai dua belas tahun.²⁹

Selanjutnya setelah pendidikan dasar, para siswa akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yang berlangsung tiga tahun, tingkatan ini untuk siswa berusia 12 sampai 15. Kurikulum pada tahap ini meliputi: Bahasa Arab, Pertanian, Seni, Bahasa Inggris, Pendidikan Industri, Matematika, Musik, Studi Agama dan Ilmu Sosial. Banyak sekolah juga menawarkan bahasa-bahasa Eropa lainnya, umumnya Perancis atau Spanyol. Sedangkan sekolah menengah atas berlangsung selama tiga tahun untuk siswa berusia 15 sampai 18. Ada tiga jenis sekolah menengah atas: *Pertama*, Sekolah Menengah Umum, yang menawarkan program akademik dalam persiapan untuk pendidikan tinggi. *Kedua*, Sekolah Menengah al-Azhar, menawarkan program akademik dengan penekanan pada pengajaran agama Islam. *Ketiga*, Sekolah Menengah Teknik, menawarkan program teknik dan kejuruan dimana siswa mengkhususkan diri dalam salah satu dari tiga aliran yang berlangsung tiga sampai lima tahun: Teknik, Industri atau Pertanian.³⁰

Agar berhasil lulus dari tingkat pendidikan menengah atas, siswa harus lulus ujian akhir agar mendapatkan Sertifikat Pendidikan Menengah Umum. Selain ujian akhir, siswa juga dinilai oleh penilaian terus-menerus selama dua tahun terakhir sekolah menengah. Di sekolah-sekolah menengah teknik, siswa dapat mengejar salah satu dari dua kualifikasi: Diploma Teknik Pendidikan Menengah dan Sertifikat Teknik Lanjutan.

²⁸ Nick Clark dan Sulaf al-Shaikhly, "Education in Egypt", dalam <http://wenr.wes.org>, (4 November 2013), 1.

²⁹ Ibid. Lihat juga: UNESCO Institute for Statistics, Global Education Digest 2010; Comparing Education Statistic Across The World, (Canada: UNESCO Institute for Statistics, 2010), 25-26.

³⁰ Nick Clark dan Sulaf al-Shaikhly, "Education in Egypt", dalam <http://wenr.wes.org>, (4 November 2013), 1.



Penerimaan didasarkan pada Sertifikat Pendidikan Dasar. 50 % dari kurikulum dikhususkan untuk mata pelajaran pendidikan umum, wajib pada tingkat ini, termasuk bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan 40 % dari waktu kelas dihabiskan belajar mata pelajaran spesialisasi dan 10 % pilihan. Bahasa Arab adalah bahasa resmi instruksi di semua tingkat pendidikan. Beberapa sekolah swasta dan universitas mengajar dalam bahasa Inggris dan Perancis.

KESIMPULAN

Modernisasi sistem pendidikan Mesir telah dimulai sejak abad ke-19 di antara tokohnya adalah Rifa'ah al-Thahthawi, namun hasilnya belum banyak dirasakan. Kemudian perubahan-perubahan secara nyata dapat diakui, yaitu sejak tahun 1952 dan tahun 1962 di mana Gamal Abdul Nasr mencoba memodernisasikan al-Azhar dengan dibukanya fakultas-fakultas baru seperti fakultas kedokteran, serta fakultas untuk wanita. Sedangkan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang terjadi di awal abad ke-20 juga terpengaruh oleh pemikiran para tokoh-tokoh di Mesir, seperti pendiri madrasah Adabiyah di Padang Panjang. Tak diragukan lagi jika dikaji tentang pendidikan Islam di Indonesia, maka secara implisit akan tertuju kepada Pesantren. Mulai dari sejarahnya, makna dari pesantren itu sendiri, sampai pada sosok yang memimpinya, yaitu sang Kiai juga dikupas tuntas. Namun, tak banyak yang kemudian mengkaji tentang madrasah itu sendiri lepas dari Pesantren sebagai pendidikan Islam paling *indigenous*.

Madrasah sebagai bagian dari kelembagaan pendidikan Islam, tentu tidak akan lepas dari sistem dan perangkat lunak lainnya yang menjadi anatomi struktur kelembagaan. Oleh karena itu, perangkat lunak yang menjadi sasaran proyek dalam rangka modernisasi harus diformulasikan dengan jelas serta komperhensif. Tentunya hal ini disesuaikan dengan khazanah dan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat serta tidak melepaskan nilai-nilai yang lama. Bahkan seharusnya, hal tersebut dijadikan sebagai tradisi konstruktif, dari yang klasik agar kemudian dijadikan pegangan dalam menghadapi era yang akan datang, khususnya terkait dengan globalisasi di segala lini. Dengan demikian, tak akan cukup hanya dengan wacana saja, tetapi butuh konstruksi dan formulasi yang jelas untuk melihat relevansi yang ada dengan kebutuhan masyarakat.

Silang sengkabut perpolitikan yang tidak berkesudahan di Mesir dan Indonesia sangat mempengaruhi kebijakan pada dunia pendidikan. Lebih-lebih, para pemegang kekuasaan tertinggi belum sepenuhnya memiliki perhatian yang besar, meskipun belakangan ini ada beberapa perbaikan dilakukan termasuk pendirian universitas baru sejak kepemimpinan Mubarak runtuh, akan tetapi belum benar-benar mendorong kemajuan lembaga pendidikan di sana. Hal yang hampir sama juga terjadi di Indonesia, semenjak era reformasi terjadi banyak perubahan pada dunia pendidikan Islam, dengan perhatian terhadap gaji guru PNS dan swasta, akan tetapi selalu saja menyisakan masalah atau problem baru bagi dunia pendidikan.[]

DAFTAR PUSTAKA



- Muhammad 'Imarah, *al-Islam Bayna al-Tanwir wa al-Tazwir*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2002)
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1980),
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum, hingga Redefinisi Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: PT. Nuansa, 2010)
- _____, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- _____, *Model Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran dalam Pendidikan Islam Kontemporer di Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016)
- Abdul Malik Fajar, [et. al.], *Begawan Muhammadiyah: Bunga Rampai Pidato Pengukuhan Guru Besar Tokoh Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005)
- Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002)
- Stanford J. Shaw, *History of The Ottoman Empire and Modern Turkey*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976)
- Hadi, Muhammad Fazlurrahman. *Rifa'ah Thahthawi: Sang Pembaharu Pendidikan Islam*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2019)
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Rifa'ah al-T{aht}awi, *Manahij al-Albab al-Misriyah fi Mabahij al-Adab al-Asriyah, diteliti oleh: Mustafa Labib Abd al-Ghani*, (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 2010)
- _____, *al-Murshid al-Amni li al-Banat wa al-Banin*, (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 2010)
- Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah*, (Malang: Madani, 2016)
- Muhammad Arkoun, *Tarikhiah al-Fikr al-Arabi al-Islami*, (Beirut: Markaz al-Inma' al-Qaumi, 1996)
- Bayard Dodge, *al-Azhar, a Millenium of Muslim Learning*, (Washington DC.: The Middle East Institute, 1961)
- Taha Husein, *Mustaqbal al-Thaqafah fi Misr*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.)
- Nick Clark dan Sulaf al-Shaikhly, "Education in Egypt", dalam <http://wenr.wes.org>, (4 November 2013)



UNESCO Institute for Statistics, *Global Education Digest 2010; Comparing Education Statistic Across The World*, (Canada: UNESCO Institute for Statistics, 2010)

Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350*, (Colorado: University of Colorado Press, t.th.)

Mujamil Qomar, *Menggagas Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

